

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Ideta Adelia Rahmadi ^{1*}, Siska Aprianti ², Riza Wahyudi ³

^{1,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Email: idetaadelia08@gmail.com ^{1*}, siskaaprianti@polsri.ac.id ², rizawahyudi70@gmail.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 10 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 20 Oktober 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Rahmadi, I. A., Aprianti, S., & Wahyudi, R. (2025). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5277-5284. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.4883>.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dengan Eviews 12 dan menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk meneliti 17 kabupaten dan kota dari tahun 2019 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial, variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah jangka panjang di Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk administrasi kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Temuan penelitian ini dapat membuka jalan bagi pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan akuntabel di masa depan dan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah; *Intergovernmental Revenue*; *Leverage*; Kinerja Keuangan.

Abstract

The purpose of this study is to examine how the financial performance of district and city governments in South Sumatra Province is affected by factors such as local government size, *intergovernmental revenue*, and *leverage*. This study uses multiple regression techniques with Eviews 12 and uses secondary data taken from the official website of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia to examine 17 districts and cities from 2019 to 2023. The results showed that Local Government Size, *Intergovernmental Revenue* and *Leverage* simultaneously affect Local Government Financial Performance. While partially, the Local Government Size variable has a positive effect on the Financial Performance of Regency / City Governments in South Sumatra Province, the *Intergovernmental Revenue* variable has a negative effect on the Financial Performance of Regency / City Governments in South Sumatra Province and the *Leverage* variable has no effect on the Financial Performance of Regency / City Governments in South Sumatra Province. These results have significant implications for fiscal policy and long-term regional economic development in South Sumatra Province, as well as for district and city administrations in the province. The findings of this study can pave the way for more open and accountable budget management in the future and help local governments to improve their financial performance.

Keyword: Local Government Size; *Intergovernmental Revenue*; *Leverage*; Financial Performance.

1. Pendahuluan

Dengan disahkannya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014, desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia, memberikan pemerintah daerah kontrol yang lebih besar atas anggaran dan pembangunan daerah mereka sendiri. Kinerja fiskal pemerintah daerah adalah indikator utama dari seberapa baik otonomi daerah berjalan di Indonesia. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran kinerja umum yang menggambarkan sejauh mana berbagai daerah dapat membiayai pengeluaran mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat. Namun, dalam praktiknya, mayoritas kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memiliki otonomi fiskal yang substansial. Rasio kemandirian beberapa daerah memiliki tingkat kemandirian fiskal di bawah 15%, yang menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kota Palembang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi sebesar 64%, berbeda dengan daerah lain yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dengan baik. Fenomena dalam penelitian ini ialah tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menghambat kemampuan daerah dalam mengambil keputusan. Selain itu, perbedaan kemandirian fiskal antar daerah juga menyebabkan ketimpangan ini dapat berdampak pada kualitas layanan publik di daerah dengan rasio kemandirian yang rendah. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kota. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara ukuran pemerintah daerah dan keberhasilan keuangannya (Dewanti, 2022; Prayuda & Arifin, 2024), sementara penelitian lain, seperti (Saraswati *et al.*, 2024; Ardhana *et al.*, 2024), tidak menunjukkan adanya hubungan tersebut. Variabel *intergovernmental revenue* memiliki dampak negatif dalam analisis (Putri & Ratnawati 2023), tetapi memiliki dampak yang substansial dalam analisis (Desky *et al.*, 2023). Beberapa penelitian juga menemukan pengaruh yang merugikan dari *leverage* (Fauziah *et al.*, 2023), sementara penelitian lain (Kusumawati, 2024), tidak menemukan pengaruh sama sekali.

Urgensi penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan pembangunan daerah maupun Pembangunan nasional. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ardhana *et al.*, 2024) dengan mengurangi variabel Pendapatan Asli Daerah dan menambahkan variabel *Intergovernmental Revenue* dan variabel *Leverage*. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini berbeda karena menemukan perbedaan dalam hasilnya. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji ketiga variabel tersebut dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah yang masih menghadapi permasalahan kemandirian fiskal. Sebagian besar studi sebelumnya juga tidak secara spesifik membahas *intergovernmental revenue* dan *leverage* dalam hubungannya dengan kinerja keuangan daerah di wilayah ini.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengkaji berbagai penelitian yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dewanti (2022) dan Prayuda & Arifin (2024) menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan, menegaskan bahwa ukuran yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan menjalankan program-program pembangunan secara lebih efektif. Namun, penelitian oleh Saraswati *et al.* (2024) dan Ardhana *et al.* (2024) berargumen sebaliknya, tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran pemerintah dan kinerja keuangan. Di sisi lain, *intergovernmental revenue* sering kali berperan sebagai faktor yang memengaruhi kinerja fiskal. Putri &

RESEARCH ARTICLE

Ratnawati (2023) menemukan bahwa intergovernmental revenue berdampak negatif pada kinerja keuangan, menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi efisiensi pengelolaan anggaran. Sebaliknya, Desky *et al.* (2023) berpendapat bahwa intergovernmental revenue dapat meningkatkan kinerja keuangan jika dikelola dengan baik. Leverage juga menjadi fokus perhatian, di mana Fauziah *et al.* (2023) menemukan pengaruh negatif dari leverage terhadap kinerja keuangan, sementara Kusumawati (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan dari leverage, menunjukkan bahwa sumber pendanaan eksternal yang berlebihan dapat membebani keuangan daerah. Penelitian-penelitian ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara ukuran pemerintah, intergovernmental revenue, dan leverage terhadap kinerja keuangan, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika ini dalam konteks daerah tertentu, seperti Provinsi Sumatera Selatan.

3. Metode Penelitian

Kategori penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji dampak dari faktor-faktor seperti Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, 85 data panel dikumpulkan dari 17 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pemerintah-pemerintah ini berfungsi sebagai unit analisis. Data yang digunakan di sini adalah data sekunder yang diambil dari LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan, kami melakukan uji asumsi tradisional (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) sebelum melakukan regresi serta menggunakan uji R^2 , uji F, dan uji t.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan data melalui nilai *mean*, standar deviasi, serta nilai tertinggi dan terendah tiap yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.125412	1258.788	1206.741	0.030000
Median	0.100000	1252.000	1205.000	0.020000
Maximum	0.660000	1327.000	1249.000	0.230000
Minimum	0.040000	1230.000	1174.000	0.000000
Std. Dev.	0.115610	22.62799	18.33235	0.035153
Skewness	3.479481	1.483975	0.305833	2.802064
Kurtosis	14.68853	4.806387	2.208376	14.28027
Jarque-Bera	655.3814	42.75418	3.544519	561.8880
Probability	0.000000	0.000000	0.169949	0.000000
Sum	10.66000	106997.0	102573.0	2.550000
Sum Sq. Dev.	1.122711	43010.19	28230.31	0.103800
Observations	85	85	85	85

Rasio kemandirian, yang mengukur kinerja keuangan (Y) pemerintah daerah, memiliki nilai terendah berkisar antara 0,040 hingga nilai tertinggi 0,660, dengan nilai rata-rata 0,125 dan standar deviasi 0,115, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Dengan nilai terendah sebesar 1230,000 dan nilai tertinggi pada

RESEARCH ARTICLE

tahun 2020 sebesar 1327,000 untuk Ukuran Pemerintah Daerah (X1), rata-rata sebesar 1258,788 dengan standar deviasi sebesar 22,627. Dari nilai terendah 1174,000 hingga nilai tertinggi 1249,000, variabel *Intergovernmental Revenue* (X2) memiliki rata-rata 1206,741 dengan standar deviasi 18,332. Nilai *Leverage* (X3) nilai terendah berkisar antara 0,000 hingga nilai tertinggi 0,230, dengan rata-rata sebesar 0,030 dan standar deviasi sebesar 0,035.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.008601	(16,65)	0.0000
Cross-section Chi-square	116.894053	16	0.0000

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji *chow* menunjukkan bahwa nilai probabilitas yaitu $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji *chow* pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

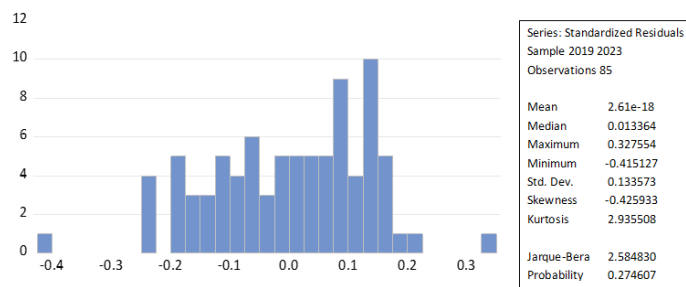
Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.356458	3	0.0001

Dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan pemilihan model terbaik dalam uji *hausman* karena berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas adalah $0.0001 < 0.05$, seperti yang terlihat pada hasil uji *hausman*).

Tabel 4. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.489783	0.937471	-0.522452	0.6031
X1	0.002376	0.000883	2.689494	0.0091
X2	-0.001968	0.000802	-2.451983	0.0169
X3	-0.025816	0.116961	-0.220721	0.8260



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,2746 > 0,05$, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Oleh karena itu, data memiliki distribusi normal, atau uji normalitas berhasil.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.119885	4617.579	NA
X1	1.47E-07	8961.077	2.860676
X2	2.31E-07	12956.97	2.954424
X3	0.022446	1.833865	1.055769

RESEARCH ARTICLE

Dari hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas terpenuhi atau data tidak menunjukkan adanya masalah multikolinearitas, karena *VIF* lebih kecil dari 10,00.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.269097	Prob. F (3,81)	0.2906
Obs*R-squared	3.815944	Prob. Chi-Square (3)	0.2820
Scaled explained SS	3.454985	Prob. Chi-Square (3)	0.3266

Berdasarkan Tabel 6, hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Prob Chi-Square pada Obs*R-squared sebesar 0,2820 > 0,05, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.311935	Mean dependent var	-6.11E-16
Adjusted R-squared	0.268387	S.D. dependent var	0.046130
S.E. of regression	0.039457	Akaike info criterion	-3.559219
Sum squared resid	0.122994	Schwarz criterion	-3.386797
Log likelihood	157.2668	Hannan-Quinn criter.	-3.489866
F-statistic	7.162961	Durbin-Watson stat	1.986371
Prob(F-statistic)	0.000014		

Dari data pada Tabel 7, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai DW berada di tengah-tengah kisaran nilai untuk dU dan 4-dU, yaitu $1,7210 < 1,9863 < 2,279$, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Rumus Analisis Regresi Linear Berganda:

$$Y = -0,4897 + 0,0023X_1 - 0,0019X_2 - 0,0258X_3 + e$$

Berikut ini adalah interpretasi dari output persamaan regresi:

Nilai konstanta adalah -0,4897, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pendapatan pemerintah menyebabkan hasil sebesar 0,04897. Dengan nilai 0,0023 untuk variabel ukuran pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa jika variabel lain dan variabel ukuran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan bernilai 1, maka variabel ukuran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan sebesar 0,0023. Dapat disimpulkan bahwa jika variabel intergovernmental revenue mengalami penurunan sebesar 0,0019. Hal ini dikarenakan variabel intergovernmental revenue memiliki nilai sebesar -0,0019 dan nilai variabel leverage sebesar -0,0258, maka jika variabel leverage mengalami penurunan bernilai 1, maka variabel leverage mengalami penurunan sebesar 0,0258.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted

Root MSE	0.023056	R-squared	0.959753
Mean dependent var	0.125412	Adjusted R-squared	0.947988
S.D. dependent var	0.115610	S.E. of regression	0.026366
Akaike info criterion	-4.231159	Sum squared resid	0.045186
Schwarz criterion	-3.656418	Log likelihood	199.8243
Hannan-Quinn criter.	-3.999982	F-statistic	81.58031
Durbin-Watson stat	1.542036	Prob(F-statistic)	0.000000

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8, nilai R^2 yang diperoleh memiliki nilai 0,9479. Dengan kata lain, variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

RESEARCH ARTICLE

ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* sebesar 94,79%. Sebagian besar lainnya, yakni 5,21%, berasal dari faktor-faktor diluar variabel model ini.

Tabel 9. Hasil Uji F (Uji Simultan)

F-hitung	F-tabel	Probabilitas	Kriteria
81,58	2,71	0,0000	< 0,05

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai sebesar 81,58 sedangkan F_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,71. Artinya " $F_{hitung} > F_{tabel}$ " dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 10. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variabel	t-tabel	t-hitung	Probabilitas	Kesimpulan
X1	1,9896	2,6894	0,0091	Berpengaruh
X2	1,9896	-2,4519	0,0169	Berpengaruh
X3	1,9896	-0,2207	0,8260	Tidak Berpengaruh

4.2 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan hasil yang mendukung hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0). Semakin besar ukuran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, semakin baik kinerja keuangannya, karena pemerintah kabupaten dan kota memiliki total aset yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembangunan infrastruktur. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa ukuran kota berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan keuangan (Dewanti, 2022; Prayuda & Arifin, 2024). Namun, penelitian oleh Sunandar (2023) dan Saraswati *et al.* (2024) tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangannya. Di sisi lain, *intergovernmental revenue* ternyata berdampak negatif terhadap laba bersih pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pada dana transfer dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, meningkatkan pendapatan dari sumber internal dapat membantu pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program dan layanan yang lebih baik (Dasmara *et al.*, 2020). Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* dapat meningkatkan kinerja keuangan, hasil tersebut tidak konsisten dengan temuan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan antara *leverage* dan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis nol diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber luar tidak memberikan dampak positif pada kinerja keuangan, dan semakin sedikit *leverage* yang dimiliki, semakin kecil ketergantungan terhadap sumber eksternal (Manafe *et al.*, 2023). Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi kesehatan fiskal pemerintah kota (Kusumawati, 2024; Saputra, 2024). Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan ketika ketiga variabel ini saling mendukung, peran daerah dapat berjalan dengan optimal, sehingga tujuan fiskal yang ditetapkan oleh pusat dapat lebih mudah dicapai.

5. Kesimpulan

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara positif oleh variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1). Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di

RESEARCH ARTICLE

Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara negatif oleh variabel *Intergovernmental Revenue* (X2). Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak dipengaruhi oleh variabel *Leverage* (X3). Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* semuanya berdampak pada variabel Y, yang mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berdampak pada kelayakan keuangan pemerintah daerah dapat lebih dipahami jika peneliti selanjutnya memasukkan lebih banyak variabel dan melakukan penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam mewujudkan penelitian ini, terutama kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan data dan informasi terkait lainnya.

7. Referensi

- Ardhana, R. L., Suhendro, S., & Kuriniati, S. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4639–4647. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9051>.
- Brigita, O., & Sri, R. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018). *e-Proceeding of Management*, 7(1), 865-871. Politeknik Negeri Bandung.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, intergovernmental revenue, dan temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39. Universitas Riau. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>.
- Dewanti, A. C. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun anggaran 2016-2020. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Fauziah, N. N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2021. *Jurnal Administrasi*, 3(November), 368–377. Universitas Padjajaran. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/download/52905/22062>.
- Manafe, H. A., Sia Niha, S., & Putu, S. P. D. (2023). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, leverage, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1322>.
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (NCAF)*, 6, 77–87. Universitas Islam Indonesia.

RESEARCH ARTICLE

- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. Universitas Jambi. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>.
- Saraswati, S. A., Inayati, N. I., Setyadi, E. J., & Dirgantari, N. (2024). Analisis kinerja keuangan: Bukti empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 10, 275–293. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung.
- Sedek, C. B. T., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, 4, 9081–9100. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyanto. (2022). *Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan Eviews*. Academia Publication.
- Sunandar, A. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah tahun 2017-2021. Universitas Islam Indonesia.